



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI DAN  
DIRUT PT PERTAMINA PERSERO**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d.12.40 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta.  
Ketua Rapat : **H. Dony Maryadi Oekon, S.T.**  
**(F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI).**  
Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos/Kabagset. Komisi VII DPR RI  
Acara : 1. Proyeksi Kuota dan Realisasi Kebutuhan LPG 3 kg  
2. Dan Lain-lain.  
Hadir : 26 orang Anggota hadir dari 50 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

**A. Anggota DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Dony Maryadi Oekon, S.T./F-PDI Perjuangan/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

7 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.

2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
7. Bambang DH.

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H. M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Drs. Mukhtarudin
3. Ir. Lamhot Sinaga
4. Bambang Hermanto, S.E.
5. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., BE (Hons), M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

0 orang anggota dari 5 anggota:

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rusda Mahmud
2. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

**7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:**

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.
4. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

0 orang anggota dari 3 anggota:

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang anggota dari 1 anggota:

**B. PEMERINTAH/UNDANGAN**

1. Tutuka Ariadji (Dirjen Migas Kementerian ESDM RI)

2. Alfian Nasution (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga)
3. Emma Sri Murtini (Direktur Keuangan PT. Pertamina Persero)

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI;  
Yang kami hormati Bapak/Ibu dan Anggota Komisi VII DPR RI;  
Yang kami hormati Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya;  
Yang kami hormati Dirut Pertamina atau yang mewakili, serta;  
Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, kita marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dirut Pertamina (Persero) yang telah hadir untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan ke V Tahun 2022-2023 pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut Pertamina (Persero) dengan agenda :

1. Proyeksi kuota dan realisasi LPG 3 kilo,
2. lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 20 anggota dari 50 Anggota Komisi VII yang terdiri atas 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi. Dan sesuai ketentuan Pasal 275 ayat (1) menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?



**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 12.30 WIB atau 1 jam setelah rapat dimulai, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)**  
**(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Subsidi merupakan barometer yang sangat penting di dalam APBN, subsidi berfungsi dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat miskin ataupun masyarakat yang rentan di tengah pemulihan ekonomi. Namun disisi lain besaran subsidi harus dikontrol dan dijaga sebaik mungkin agar tidak terjadi pembengkakan yang nantinya akan memberatkan negara.

Salah satu perhatian Komisi VII DPR RI dalam Raker dengan Menteri ESDM Republik Indonesia dalam pembahasan asumsi makro sektor ESDM pada tanggal 5 Juni 2023 adalah kuota volume LPG 3 kilo. Kuota volume LPG 3 kilo dalam APBN 2023 dialokasikan sebesar 8 juta metrik ton, di mana proyeksi dari pemerintah untuk tahun 2023 sebesar 7,9 juta metrik ton, sedangkan proyeksi dari Pertamina sebesar 8,22 juta metrik ton atau *over* kuota dari APBN 2023.

Kemudian dalam rapat kerja tersebut juga dibahas proyeksi volume LPG 3 kilo tahun 2024 dengan berbasis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan mulai normalnya aktifitas proyeksi setelah Pandemi Covid, diperkirakan akan ada peningkatan volume LPG 3 kilo di kisaran 8,2 juta hingga 8,3 juta metrik ton, untuk itu secara khusus pada hari ini Komisi VII DPR RI ingin mendalami terkait proyeksi kuota dan realisasi LPG 3 kilo tersebut.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh Pertamina untuk menyampaikan pemaparannya, kami persilakan.

Singkat saja Pak, singkat, pemaparannya singkat saja *kan* sudah dibahas tadi dari awal, terima kasih.



**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi VII DPR RI; Yang saya hormati yang mewakili dari Direktur PT Pertamina di sini Ibu Direktur Keuangan dan Direktur Logistik dan Direktur Patra Niaga beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Selamat siang, salam sejahtera.  
*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan agenda :

1. Proyeksi kuota dan realisasi kebutuhan LPG 3 kilogram, dan
2. Lain-lain.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram pada tahun 2022 mencapai 7,8 juta metrik ton, sedangkan pada tahun 2023 kuota LPG tabung 3 kilogram sebesar 8 juta, termasuk cadangan  $\frac{1}{2}$  juta ton, di mana realisasi penyaluran sampai dengan Bulan Mei 2023 sebesar 3,32 juta metrik ton atau 41,6%.

Pada Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII tanggal 5 Juni 2023 yang lalu telah disampaikan bahwa *output* volume LPG 3 kilogram tahun 2023 adalah 7,9 juta metrik ton dan kuota yang disepakati untuk diajukan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 adalah 8,2 sampai 8,3 juta metrik ton.

Selanjutnya disampaikan distribusi penyaluran LPG tabung 3 kilogram berdasarkan wilayah MOR atau *Marketing Operation Region*) PT Pertamina sebagai berikut : di MOR 1 Sumbagut mencapai 41,6% dengan rincian realisasi tahun 2022 sebesar 6,93 juta metrik ton dan realisasi sampai dengan Mei 2023 sebesar 0,4 juta ton.

Di MOR 2 sebesar 42%, di MOR 3 sebesar 41,5%, di MOR 4 Jawa Bagian Tengah mencapai 42%, di MOR 5 Jawa Timur dan Bali sebesar 41,6%, di MOR 6 di Kalimantan 41,8%, dan di MOR 7 di Sulawesi 40,2%. Total penyaluran LPG tabung 3 kilogram secara nasional mencapai 41,6% dengan total agen PSO sebanyak 5.165, adapun realisasi tahun 2022 sebesar 7,8 juta ton, kuota 2023 sebesar 8 juta ton termasuk cadangan  $\frac{1}{2}$  juta ton, dan konversi LPG petani dan layanan konkit sebesar 0,02 juta ton.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 realisasi penyaluran LPG tabung 3 kilogram terus meningkat sebagaimana ditampilkan dalam histogram



berikut ini; tahun 2018 realisasi sebesar 6,53 atau melebihi dari kuota yang ditetapkan sebesar 6,45 juta ton, tahun 2019 realisasi 6,84 dari kuota yang 6,98 tahun 2020 7,14 melebihi dari penetapan 7.

Tahun 2021 realisasi 7,46 juta ton, tahun 2022 realisasi mencapai 7,8 juta ton dari penetapan 8 juta ton, tahun 2023 hingga Bulan Mei penyaluran mencapai 3,32 juta ton dari kuota yang ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton.

Selanjutnya berbalikan dengan LPG PSO, realisasi penyaluran LPG non PSO dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan, penurunan LPG non PSO tahun 2019 sebesar 0,06, tahun 2020 sebesar 0,62, tahun 2021 sebesar 0,6, tahun 2022 sebesar 0,46, adapun penyaluran LPG non PSO sampai dengan Bulan Mei 2023 sebesar 0,15 juta ton. Lanjut.

Kami bersama PT Pertamina (Persero) telah melakukan pendataan dan pencocokan data pengguna serta pencatatan transaksi LPG 3 kilogram dari awal tahun 2023 dengan jadwal kerja sebagai berikut; persiapan dan uji coba keandalan sistem yang dimiliki Pertamina yaitu *Merchant Apps My Pertamina Life* atau MAP yang dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Februari 2023, kemudian sosialisasi, kemudian implementasi di Pulau Jawa, Bali, dan NTB yang ditargetkan selesai pada Bulan Juni 2023 mencakup 138 Kota Kabupaten.

Kemudian dilanjutkan implementasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ditargetkan selesai pada Bulan Juli 2023 yang mencakup 273 kota dan kabupaten. Setelah evaluasi program ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan sejak Maret hingga Desember 2023.  
Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian penjelasan kami, mengenai topik yang terakhir disampaikan, selanjutnya kami mengharapkan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Dirjen, silakan dilanjutkan dari Pertamina.

**DIREKTUR KEUANGAN PT. PERTAMINA PERSERO (EMMA SRI MURTINI):**

Mohon izin dapat dilanjutkan langsung oleh Pak Dirut Patra Niaga barangkali tadi menyampaikan apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen betul sekali bahwa *prognosa* untuk 2023, apabila tidak terdapat kebijakan penyesuaian untuk pengendalian penerima LPG memang diproyeksikan akan mencapai kuota atau bahkan melebihi kuota, *nah* barangkali ini yang barangkali menjadi pembahasan bersama. Untuk selanjutnya detailnya mohon Pak Alvian silakan menyampaikan.



**DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Data dari Pertamina mungkin tidak jauh berbeda dengan yang dari Migas yang disampaikan Pak Dirjen, mungkin beberapa hal yang harus saya kasih mungkin *highlight* ke Bapak Pimpinan adalah pertama disampaikan bahwa *trend* penyaluran LPG PSO ini meningkat 5% dibandingkan *year to date* Mei 2023 dibandingkan *year to date* Mei 2022 dan lebih besar 8,4% dibandingkan kuota *year to date* Mei 2023, dan ini juga kita sudah buat *sesionalitas*-nya sehingga penyokong usaha kami di akhir nanti Desember 2023 akan *over* 2,7% Pak Pimpinan.

Yang kami garis bawah mungkin yang grafik yang paling bawah Pak Pimpinan, bahwasanya kalau kita lihat dari nilai subsidi *gitu*, *year to date* Mei 2023 ini realisasi 34 triliun, sementara APBN kita adalah 117 triliun, *prognosa* kami 85,45 triliun, artinya terhadap DIPA masih ada kelebihan DIPA untuk LPG di 2023 ini.

*Nah* ini mungkin yang menjadi usulan kami Pak Pimpinan, terkait dengan prognosa 2023 yang kita akan *over* 2,7%, artinya prognosa 2023 kami itu bukan 8 juta metrik ton tapi realisasinya akan bergeser ke 8,2 juta metrik ton LPG-nya, *nah* kalau DIPA-nya ada kelebihan sekitar 32 juta US dolar, *sorry* 32 triliun *gitu* mungkin ini akan bisa mengkonversi yang untuk selisih 2,7% *over* kuota LPG tersebut.

Lanjut, sekilas mungkin daerah-daerah yang *over* kuota ini hampir seluruh lokasi, baik Sumabagut, Sumbagsel, Jawa Bagian Barat, DKI, Jawa Bagian Timur, Jatim Balinus, Kalimantan, Sulawesi dan totalnya sekitar 2,8% seperti yang saya sampaikan tadi.

Lanjut, sementara untuk yang sektor rumah tangga non PSO-nya seperti yang juga disampaikan tadi bahwa terjadi penurunan ini akibat disparitas harga yang tinggi, kalau kita bandingkan antara 2022 dan 2023 yang LPG non PSO rumah tangganya terjadi pergeseran 21%. Dan kalau kita lihat dari 2019 yang semulanya sekitar 660.000 atau 0,66 juta metrik ton volume LPG non PSO rumah tangganya itu agak bergeser dari prediksi kita, dan realisasi sampai *year to date* Mei 2023 itu LPG non PSO rumah tangganya hanya 0,15 juta metrik ton, kembali lagi ini mungkin akibat disparitas harga yang tinggi dan proporsi LPG PSO dan non PSO rumah tangga adalah 4,4% yang non PSO-nya, 95,6% yang non PSO-nya.

Sementara itu untuk 2024 kami proyeksikan ada peningkatan sekitar 2% dibandingkan *demand* 2023, di mana kami proyeksikan angkanya akan bergeser ke 8,38 juta metrik ton, sementara untuk *transisionalitas*-nya itu hampir sama dari tahun ke tahun dan saya kira seluruh Anggota Komisi VII juga sudah

paham ketika tren-nya akan turun setelah lebaran kemudian akan naik sampai akhir Desember 2023.

Mungkin itu yang kami sampaikan, dan kembali lagi mungkin kita, kami *highlight* bahwasanya untuk *prognosa* 2023 ini akan terjadi *over* sedikit dan kami harapkan itu bisa ditutupi dari kompensasi DIPA yang masih ada sekitar 32 triliun. Itu mungkin usulan kami Pak Pimpinan, terima kasih kami kembalikan ke Bu Emma.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih, sudah cukup Pak Dirjen yah? Terima kasih atas paparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen Migas dan perwakilan dari Pertamina, selanjutnya kami persilakan kalau Bapak/Ibu ada yang mau dipertanyakan, singkat padat saja, pembahasan sudah dalam tadi, silakan Pak.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**

Pimpinan, ini sudah kita pahami.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Gandung kemudian nanti Pak Mul, silakan.

**F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):**

Iya, sudah kita pahami maka bisa dilanjutkan dengan kesimpulan, sudah kita baca dan bisa kita terima ini, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Gandung, silakan Pak Mul.

**F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):**

Baik terima kasih Pimpinan, kami juga *nggak* ingin terlalu berlama-lama, namun secara umum kami melihat dengan penurunan harga CPR untuk sesuai dengan asumsi, berdasarkan asumsi kita, maka *kan relatifly* ada ruang ya, sehingga penambahan kuota itu dimungkinkan, saya melihat kalau selisihnya hanya 2%-an lebih *insya* Allah di angka 8,30 *gitu* ya itu terpenuhi gas, namun karena ini *kan nggk* mudah ya kita mengusulkan angka seperti itu, dan belum tentu jadi, jadi kami mengusulkan memang untuk tahun ini asumsi makronya sebesar 8,5 juta ton.

Yang kedua yang ingin kami tekankan juga terkait harga non PSO yang tinggi sehingga memicu disparitas harga yang tinggi, memicu pengalihan, itu bisa ada 2, karena daya beli orang jadi pindah atau pengoplosan saya melihat



ini, ini saya khawatir yang kedua pengoplosan, karena pernah di daerah saya itu terjadi kebakaran yah, agen LPG itu, ternyata ngoplos ya, dan ini terus terang *backing*-nya itu ternyata ya aparat juga, jadi memang tugas Pertamina ini, antara lain Dirjen Migas ya berat ini karena harus berhadapan juga di lapangan dengan kondisi yang seperti itu. Karenanya saya menghimbau ini harus kita pikirkan agar pengawasan ini bisa lebih ditingkatkan.

Yang terakhir, karena harga yang tadi disparitas yang tinggi memang ke depan mau tidak mau, suka atau tidak suka kita harus mereduksi LPG ini dengan substitusi dari gas alam, itu saya rasa strategi utama kita, secara bertahap ini harus terus dikurangi LPG ini, sehingga devisa rotasi berjalan kita terus berkurang, kalau begini terus berat kita nanggungnya ya, apalagi yang LPG PSO *kan*, ini *kan* 90% lebih ini, ini harus dikurangi.

Saya lihat-lihat kok ketimbang apa penggunaan listrik, kompor listrik, DME apalagi tidak jelas juntrungannya, kabur investor juga *kan* batal, memang penggunaan gas alam ini menjadi paling, paling dekat *gitu*, *nah* ini harus terus didorong. Apalagi Cisem-Batang sudah jadi *kan*, makin mudah. Demikian Pimpinan usulan dari kami.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Mul, iya sebentar ini seperti yang Pak Mul sampaikan tadi masalah oplos segala macam ini *kan* juga belum selesai ini Pak, Gakkumnya juga *kan* kita belum ada ini di ESDM, makanya kita tuntutan kemarin pada saat pembahasan terakhir *kan* kita minta Gakkum ini tetap harus ada di Kementerian ESDM, karena menindaklanjuti yang seperti ini ya.

Contoh misalnya oplos kemudian ada lagi temuan masalah di tambang juga peti, ini *kan* juga Gakkumnya kita *nggak* kuat, *nah* ini makanya kita tuntutan sekali Komisi VII kemarin menuntut ke Kementerian ESDM untuk membentuk Gakkum yang ada di Kementerian ESDM. Silakan Pak Hendrik nanti selanjutnya Pak Ramson.

**F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati;  
Pak Dirjen Migas beserta jajaran;  
Ibu Direktur Keuangan, Pak Direktur Logistik, dan juga Pak Alvian yang kami hormati.

Saya hanya khusus untuk Pak Dirjen Migas saja, di luar dari paparan ini terima kasih paparannya. Begini Pak, ada temuan demikian, kita ingin tahu sampai sejauh mana pengawasan Dirjen Migas terhadap penyalur INU Pak? Izin Niaga Umum, Pak. Karena seringkali terjadi, prakteknya begini Pak, prakteknya langsung, ada pengadaan di BUMN justru penyalur dari BUMN

sendiri yang kalah, yang menang itu INU ini *gitu loh*, kalau ditanya darimana BBM-nya kita juga *nggak* tahu darimana, karena, karena dari Pertamina sendiri sudah tidak, artinya tidak menyalurkan lah ke INU tersebut *gitu lho*, *nah* kita harus bertanya ini BBM ini darimana *gitu loh*, *nah* sampai sejauh mana Dirjen Migas mengawasi ini *gitu*?

Kita khawatir nanti BBM yang disalurkan adalah tampungan-tampungan yang *nggak* jelas ini Pak, apalagi INU tersebut tidak ada izin impornya, jadi kita mau tahu darimana dia, apa namanya BBM-nya ini? Jadi saya kira disini juga Pertamina Patra Niaga sudah berusaha menahan seperti itu *gitu loh* ya, jadi kita harapkan Dirjen Migas tegas terhadap INU-INU yang tidak jelas ini *gitu* Pak, darimana mereka BBM-nya? Sedangkan dari Pertamina di-*stop* Pak, importnya tidak, dia tidak ada impor nya Pak, terus darimana ini? *Nah* saya harapkan Dirjen Migas di sini tegas Pak, dan itu penyaluran BBM-nya ke BUMN pula lagi itu, *nah* jadi saya minta tanggapan terhadap temuan kami ini, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Hendrik, dilanjut Pak Ramson silakan.

**F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota yang terhormat;

Pak Dirjen;

PLT Bu Dirut sama Direksi Pertamina dan Dirut Pertamina Niaga.

Jadi pemaparan Pak Dirjen cukup bagus, cuman saya dapat informasi masih ada yang diblok oleh Dirjen Migas Pak yah, yang kuota LPG 2023, seperti tadi barusan saya disampaikan oleh Ibu Paramitha, boleh saya sampaikan *kan*? Malah katanya di Jawa Tengah *supply*-nya di bawah *demand*, karena memang pertumbuhan permintaan masyarakat itu meningkat, karena kemarin *kan* tahun-tahun kemarin Covid, sehingga pergerakan ekonomi belum begitu meningkat, terus peningkatan konsumsi masyarakat juga belum begitu meningkat, malah pertumbuhan ekonomi kita sempat minus juga *gitu*, tapi ini *kan* sudah meningkat, meningkat pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan bertambah, konsumsi masyarakat meningkat, tetapi masih masyarakat yang menegah bawah, *nah* ini *demand* atau permintaan terhadap LPG 3 kilogram juga meningkat.

*Nah* ini tolong dipertimbangkan Pak Dirjen, malah sebenarnya tadi saya sependapat dengan Pak Dr. Mulyanto supaya dinaikkan menjadi 8,5 juta metrik ton kuota untuk 2024. Dan 2023 ini, ini *kan* diestimasi waktu kemarin masih belum begitu meningkat pertumbuhan ekonomi kita, tapi realisasinya 2023



meningkat, *nah* ini perlu dipertimbangkan juga solusinya nanti di lapangan Pak Dirjen dari sisi kebijakan pemerintah bisa bersama DPR RI membuat keputusan-keputusan politik untuk kepentingan masyarakat kecil.

Intinya itu kepentingan masyarakat menengah ke bawah, saya pikir semua fraksi juga selalu memikirkan kepentingan masyarakat menengah ke bawah, biarpun ada juga yang memikirkan kepentingan yang elite, itu hanya sebagian kecil saja, karena suara terbanyak ini di menengah ke bawah. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan ke Pak Dirjen Migas.

Untuk Pertamina agar bagaimana operasionalnya berjalan lancar, itu memang sangat penting, sehingga realisasi kepada masyarakat yang memerlukan itu tidak terlalu, bahasa awamnya tidak terlalu ribet *gitu*, karena kadang-kadang apalagi di daerah-daerah kalau terlalu ribet kadang-kadang mereka kesulitan, kalau kesulitan mau cari yang termudah dan termudah kadang-kadang harganya lebih tinggi karena sudah sampai dari agen pangkalan pengecer dari pengecer ke yang apalagi ini, *nah* jadi itu juga perlu dipertimbangkan supaya lebih lancar, jadi tidak sulit masyarakat kita. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam.*

Terima kasih Pak Ramson, lanjut Pak Rico setelah itu terakhir Ibu Paramitha.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Baik, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh ada Pak Willy juga, ya.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Terima kasih untuk paparannya Pak Dirjen dan Pak Alvian, juga rekan-rekan yang dari Pertamina semuanya. Saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Mulyanto sama Bung Dr. Ramson Siagian. Ada juga beberapa masukan surat aspirasi dari masyarakat terkait dengan BBM yang katanya masih langka, sementara kalau menurut paparan tadi kalau saya baca seperti apa yang diterangkan kayanya memang ada dampak dari tadi entah itu pengoplosan atau apa sehingga dari PSO semua beralih ke, mungkin yah



beralih ke LPG 3 kilo, apa daya beli yang semakin kurang atau orang nakalnya yang semakin banyak. Yang menjadi tugas dari Pertamina tentunya untuk pengawasannya lebih ketat lagi.

Saya sepakat apabila sampai dengan hari ini kalau pemakaiannya, memang Raker kemarin kita sudah tetapkan ya kurang lebih *range*-nya antara 8,2 sampai 8,3 tapi terkait dengan pembahasan tadi yang sudah dijelaskan artinya estimasi yang sekarang ini sampai dengan hari ini mohon izin interaksi sedikit Pimpinan, Pak Dirjen mungkin sampai dengan hari ini atau dengan Pak Alvian kalau pemakaiannya LPG berarti 3 koma berapa itu kalau sampai dengan hari ini? Mic-nya Pak, mungkin mic-nya.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

3,32 juta metrik ton.

**F-NASDEM (RICO SIA):**

Iya, kalau sampai dengan hari ini, ini sekarang bulan 6 yah, kalau 3,22 per sampai sekarang per Mei ini berarti tentunya pastinya nanti akan kurang apalagi tahun depan, oleh karenanya mungkin saya sepakat dengan Pak Dr. Mulyanto dan Bung Dr. Ramson Siagian bahwa kalau, memang Raker kemarin kita 8,2 tapi kalau melihat asumsi yang hari ini dengan laporan yang hari ini mungkin bisa diajukan sebagai catatan ditambahkan menjadi 8,5 begitu bukan 8,3.

Lalu kemudian yang terakhir di paparan potensi *over* kuota penyaluran LPG 3 kilo tahun 2023 ini kebanyakan masih di daerah tengah ke barat, saya lihat di wilayah timur karena memang kita belum ada konversi, karena ini juga dapil saya dari Papua Barat juga mungkin Kakak Ina di sini ya, di Papua mudah-mudahan bisa dipercepat juga karena di sana juga ada masyarakat yang membutuhkan, bahkan banyak sangat yang membutuhkan LPG 3 kilo, bayangkan PSO di sana harganya sudah 300.000 lebih, hampir 400.000, jadi kalau, bukan permintaan kalau boleh tapi mohon perhatiannya untuk wilayah bagian timur ini sehingga masyarakat di sana merasa ada keadilan lah begitu.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Silakan Ibu Paramitha.



**F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta sahabat-sahabat Komisi VII, dan;

Yang saya hormati Bapak Dirjen Migas beserta jajarannya.

Terkait agenda kita hari ini soal kuota kebutuhan LPG 3 kilo, pertanyaan pertama saya untuk Pak Dirjen Migas, saya ingin mempertanyakan soal Kep Dirjen Nomor 99 yang baru saja Bapak keluarkan Pak, ini kok tidak ada sosialisasi ya Pak, tahu-tahu keputusan ini keluar begitu, padahal waktu rapat dengan Panja Migas itu Pak Dirjen menyampaikan bahwa Kementerian ESDM masih sulit mengidentifikasi siapa yang pantas menerima subsidi, kok tiba-tiba keluar aturan dari Pak Dirjen bahwa akan ada pendapatan di daerah ini, ini, dan ini *gitu*, dulu katanya mau pakai data komprehensif dari Kemensos dan ternyata datanya tidak akurat *gitu kan* Pak, lah sekarang malah mau pakai data dari Kemenko PMK, padahal sampai tanggal 27 Mei kemarin saja Pak Menko PMK bilang bahwa data mereka masih belum valid Pak, tetapi saya dapat laporan ternyata di lapangan sudah ada yang dimintai KTP-nya ketika mau beli LPG, katanya untuk mencocokkan dengan data PMK, kok seperti ini ya Pak Dirjen ya?

Jadi memang di bawah itu apa namanya gaduh gitu Pak, karena *kan* kalau sampai lupa tidak bawa KTP atau lain sebagainya ini berarti masyarakat kecil ini *nggak* bisa beli LPG begitu Pak, ini berarti menurut saya Bapak tidak memahami psikolog, psikologis masyarakat kecil begitu.

Dan atas dasar apa ini Pak Dirjen menetapkan kabupaten dan kota yang harus dimintai KTP untuk beli LPG. Dapil saya itu Brebes itu tidak masuk di dalam pendataan padahal kemiskinannya itu ekstrim, tinggi, tolong Pak kalau ada kebijakan soal pendistribusian migas di hilir kami diajak konsultasi dulu Pak, karena kami ini kan wakil rakyat, jadi jangan tiba-tiba keluar aturan seperti ini *gitu* Pak.

Ya jadi nanti bisa-bisa ini masyarakat panik akhirnya membeli LPG sebanyak-banyaknya, akhirnya nanti terjadi kelangkaan. Kemudian terkait kuota dan kebutuhan tiap wilayah provinsi kabupaten kota yang sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen Migas, apakah itu sudah sesuai dengan usulan Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Pak? Karena kuota untuk Jawa Tengah kok berkurang yah Pak, padahal mungkin Bapak tahu sendiri garis kemiskinan di Jawa Tengah ini meningkat setelah adanya Covid 2 tahun yah, kalau ujung-ujungnya Pak Dirjen yang memutuskan sendiri untuk apa Pemprov, Pemkab, dan Pemkot ini melakukan kajian dan mengusulkan kuota ke Pak Dirjen, kalau begitu berarti keputusan Pak Dirjen ini tidak tepat sasaran menurut saya.



Yang kedua untuk Ibu Dirut Pertamina, tapi kelihatannya Ibu Dirut tidak hadir, mungkin ada Pak Alvian dan Ibu Ema, masih soal kuota juga Pak Dirut, eh Bu Dirut, Bu Dirutnya *nggak* ada ya, saya dapat laporan dari teman-teman agen LPG di bawah soal kebijakan pembelian LPG ketika hari libur nasional atau di tanggal merah, di beberapa wilayah kalau hari libur nasional atau tanggal merah tidak boleh ada penambahan pengiriman gas ke agen LPG, katanya kebijakan ini dari Pertamina pusat, itu betul atau tidak Pak? Padahal biasanya di hari libur itu justru permintaannya *kan* pasti meningkat seperti Lebaran, libur-libur yang kejeput itu *kan* banyak pada masak karena biasanya dari Jakarta juga pada pulang ke kampung.

Setahu saya Pertamina pusat ini tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu, jadi tolong ini Ibu Dirut dan juga Pak Alvian, staf-stafnya yang di bawah diterbitkan supaya sinkron dengan apa yang ditetapkan oleh pusat, apalagi mereka seringkali berdalih bahwa yang mereka lakukan itu berdasarkan keputusan pusat. Demikian dari saya, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dilanjut Pak Willy, kemudian yang terakhir Pak Bambang Hermanto.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):**

Terima kasih Pimpinan. Langsung saja ke Pertamina Patra Niaga, Pak Alvian mungkin beberapa waktu yang lalu saya perlu menginformasikan di Kalteng itu khususnya Kota Palangkaraya dan beberapa kabupaten itu cukup heboh, sudah sampai masuk ke ranah Legislatif atau di DPRD itu membahas tentang gas 3 kilogram yang harganya sangat meningkat kemudian tentu juga bisa saya katakan sangat memberatkan.

Saya ingin meminta juga *gitu* agar perlu ada sosialisasi yang nanti menyertakan kami ada 3 anggota di Kalteng itu dari Komisi VII untuk membantu menjelaskan ini, karena kelihatannya juga kita tidak dilibatkan sementara kita punya dapil dan juga perlu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat pusat mungkin itu salah satu usul kami, dan kita bisa bersama-sama mungkin Pak Alvian ke sana mengutus orangnya, karena ini cukup heboh tetapi tidak melibatkan kita.

Kedua, saya menyoroti tentang potensi *over* kuota yang tadi sudah dijelaskan lebih dari 100% yah, 100,9% dari APBN 8 juta meter ton itu menurut hemat kami ini banyak orang yang tidak paham Pak Alvian ya, mungkin perlu nanti Pak Alfian bisa menjelaskan untuk kita semua, ya dari data kita melihat tadi sudah ada di, di apanya materi 135 halaman ini saya melihat khususnya, kalau umpamanya di daerah Kalimantan, Sulawesi, kalau kita melihat yang *over* ini di daerah mana *gitu*, di provinsi mana? Karena katanya itu langka tetapi



kok *over gitu* loh, *nah* mungkin ini kami minta juga sedikit penjelasan agar yang dimaksud dengan *over* kuota itu sebagaimana yang nanti disampaikan *gitu*, untuk kami juga bisa menjelaskan, sementara katanya langka tapi justru *over* ya.

*Nah* mungkin ini yang ingin saya sampaikan, saya mendukung juga apa tadi yang disampaikan memang kita berpikir gas alam ini *kan* masih punya potensi ya untuk kita membantu agar subsidi untuk PSO ini tidak terlalu besar untuk membebankan APBN kita menjadi bahan pertimbangan.

Malah saya mau usulkan juga di rapat ini kalau memang bisa kita coba merubah dari 3 kilogram itu menjadi mungkin 4 atau 5 kilogram supaya itu lebih efisien mungkin dalam jumlah atau lamanya pemakaiannya, walaupun nanti akan terjadi investasi dalam hal tabung *gitu*, jadi kita akan tingkatkan dari yang 3 kilogram umpamanya yang nanti jadi 5 kilogram, mungkin itu hanya usul saja dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke Pimpinan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Siap, terima kasih Pak Bambang, eh Pak Willy, silakan Pak Bambang Hermanto nanti dilanjut Ibu Roro.

**F-GOLKAR (BAMBANG HERMANTO, S.E.):**

Baik.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya hormati;  
Pak Dirjen, Ibu Direktur Keuangan dan seluruh jajarannya, Direktur Utama Parta Niaga;  
Seluruh yang hadir di sini yang saya hormati.

Jadi pada prinsipnya saya menyetujui apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen paparannya bahwa memang subsidi gas itu harus ada azas pemerataan dan keadilan, oleh karena itu saya sepakat dengan angka-angka yang tadi disampaikan, mudah-mudahan ini dalam nanti pembahasan di dalam apa namanya RDP angka-angkanya bisa rasional kita sampaikan.

Lalu kemudian sesuai dengan hasil sosialisasi tempo hari Pak, dengan BPH Migas, ini kita masih ada informasi kemudian masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan apa namanya, kelangkaan gas bersubsidi, tapi ini juga saya kira ini masih perlu di apa namanya, perlu diteliti lagi karena memang ini masukannya hanya dari beberapa kelompok masyarakat tetapi ini sangat sering Pak, ini karena saya memang ada di Dapil Indramayu dan Cirebon dan masyarakat itu juga banyak tahu tentang saya sehingga banyak juga yang seringkali memberikan informasi kepada saya Pak.

Oleh karena itu barangkali informasi ini bisa menjadi masukan buat kita apakah memang ini kelangkaannya ini dari sisi mana, apakah dari distribusinya atau memang dari sisi posisi apa namanya keagenannya, atau memang seperti apa Pak, barangkali ini bisa menjadi masukan buat kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Lalu kemudian saya melihat lagi Pak, di Indramayu itu ada depo di Eretan, itu Depo LPG yang, namanya depo Pak ya bukan SPPBE, dulu itu menjadi Depo LPG kemudian beberapa tahun belakangan sempat *stop*, lalu kemudian *stop* di Depo LPG itu dia memproduksi apa namanya gas yang 15 kilo, Bright itu merknya kalau *nggak* salah, itu *kan* non subsidi itu.

Kemudian sekarang menjadi depo lagi LPG, lalu kemudian saya melihat itu masih ada produksi yang 15 kilo itu Pak, masih sering saya lihat itu ada muncul dari sana, sehingga menjadi bahan pertanyaan saya, apakah depo ini menjadi depo gas yang subsidi atau yang non subsidi? Karena itu kita sulit membedakan Pak, keluarnya sama-sama dari pintu yang sama, sumbernya kita tidak tahu dari mana, oleh karena itu saya pikir ini harus menjadi juga periksa buat kita kita Pak, karena ini sangat sumir Pak, kita *nggak* bisa lagi membedakan mana yang subsidi, mana yang non subsidi karena keluarnya dari tempat yang sama. Saya kira demikian informasi dan masukan dari saya Pak Dirjen dan Pak Direktur yang hadir disini, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Silakan dilanjut Ibu Roro.

**F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Baik, terima kasih Pimpinan atas kesempatannya.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua;  
Anggota yang saya banggakan, dan juga;  
Mitra kerja kami baik dari Kementerian ESDM Pak Dirjen dan juga Ibu Ema beserta seluruh jajaran dari PT Pertamina.

Jadi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, saya akan coba untuk menyampaikannya. Jadi yang pertama berkaitan mengenai kebijakan subsidi LPG yang tepat sasaran menggunakan, tadi sudah disampaikan



sebetulnya kebijakan baru bahwasanya saat ini sedang diupayakan agar data yang kemudian digunakan itu datang dari Kemenko PMK ya Pak berarti ya?

*Nah* saya ingin mengetahui sebetulnya perbedaan yang, apakah perbedaannya signifikan dibandingkan data yang selama ini kita gunakan melalui data dari Kementerian Sosial, itu yang pertama. Dan perbedaan intinya itu apa untuk kemudian kita mengalih dan menggunakan data tersebut, karena subsidi LPG tepat sasaran ini *kan* sangat amat penting dan kami berharap bahwa masyarakat yang layak menerima subsidi itu betul-betul menerima subsidi tersebut *gitu*, ini *kan* permasalahan sudah mungkin sudah bertahun-tahun ya Pak Ketua, sejak periode lalu juga. Jadi penjelasan itu terlebih dahulu.

Lalu kemudian berkaitan lagi mengenai LPG 3 kilogram ini, khusus di wilayah Jawa Timur, jadi kebetulan di wilayah ini juga sempat ada penolakan di kalangan masyarakat terhadap penerapan kebijakan yang baru itu tadi bahwasanya pembelian gas LPG ini harus menggunakan sistem, sebetulnya sistemnya itu kurang lebih sama seperti yang diterapkan di Pertamina yang mengenai BBM ya, jadi *kan* MyPertamina ada sistem baru menggunakan sistem lama agar lebih tepat sasaran lah atau paling tidak kontribusi terhadap x-data, penyempurnaan data yang sudah *existing*.

*Nah* itu saya ingin mengetahui bahwa dengan penerapan kebijakan ini dan kelihatannya masyarakat itu agak resah Pak dan Ibu mengenai bahwasanya ini kelihatannya cukup rumit *gitu* untuk kemudian mereka *fullfil*, *nah* saya ingin tekankan saja bahwasanya kita semua *kan* berupaya ya untuk melakukan sebuah terobosan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut *gitu kan*, kalau saya lihatnya niatnya itu ada di situ.

*Nah* namun saya ingin mengetahui sejauh mana sosialisasi yang selama ini dilakukan untuk kemudian agar masyarakat itu bisa paham dan lalu mereka juga bisa melakukan sesuai daripada kebijakan yang baru, karena saya yakin kemarin yang dengan MyPertamina itu juga berproses hingga saat ini juga berproses.

Jadi itu yang ingin saya tanyakan, intinya jangan sampai masyarakat itu kesulitan *kan* seperti itu *kan* sebetulnya, *nah* itu kami sebagai wakil rakyat juga harus menyampaikan karena ini seharian kita dengerin komplain dari masyarakat seperti ini. Itu berkaitan mengenai itu, dan Pak Ketua izin karena ini mumpung ketemu juga berkaitan mengenai distribusi hilir migas ya, jadi terkhusus BBM yang berupa solar bersubsidi.

Saya mohon izin saya rasa ini harus saya sampaikan, kalau tidak saya merasa bersalah karena beberapa waktu ini saya dikontak oleh teman-teman dari lintas kalangan yang berada di Pulau Bawean, jadi Pulau Bawean ini adalah wilayah terpencil, ini merupakan wilayah 3 T, padahal masih dalam lokus secara administrasi itu bagian dari Jawa Timur di Kabupaten Gresik.

Dan di wilayah ini banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan makanya saya kepingin sekali nanti dengan harapan baik itu dari Pak Dirjen



Migasnya atau kebijakan dari Pertamina nanti kita sampaikan juga ke BPH Migas agar dilakukan sebuah pendampingan dan saya mohon sekali agar ini menjadi fokus, salah satu fokus lah, karena banyak sekali masyarakat yang cukup resah dengan situasi yang ada di sana, yang pertama mulai dengan BBM satu harga yang belum dirasakan di wilayah tersebut, karena misalnya solar bersubsidi yang seharusnya *kan* kurang lebih 6.000-6.500-an atau hingga sampai 6800, disana dijualnya itu dari kisaran 13.000-15.000 per liter, jadi ada disparitas harga yang terjadi dan masyarakat merasa ini tidak *fair*, itu yang pertama.

Lalu kemudian *demand*-nya tinggi terkhusus dari kalangan nelayan, jadi kemarin saya sempat koordinasi sama mereka juga, lalu kemudian yang disampaikan adalah bahwa *supply*-nya dikit, jadi ada 2 SPBU yang ada di wilayah tersebut, kalau di Bawean ini *kan* ada 2 kecamatan, Sangkapura dan Tambak, tapi intinya *existing* SPBU disitu tidak men-*supply* BBM yang mencukupi untuk masyarakat di sekitar, *nah* otomatis karena sebetulnya *demand*-nya tinggi, tapi karena ada kelangkaan *supply* dan di situlah masuk permainan harga dan lain-lain yang kemudian merugikan masyarakat.

Walaupun kemarin *update*-nya dari segi harga mungkin sudah ada titik temu tapi saya mohon kalau misalnya ada *finding* atau dari pusat *gitu* ya ada penjelasan mohon *dishare* kepada saya agar saya juga bisa mensosialisasikan kepada mereka. Di samping itu memang pada dasarnya masih ada beberapa permasalahan lainnya, baik itu dari segi lokasi dan waktu distribusi, jadi sistem SPBU-nya itu kaya *gitu* itu, kadang-kadang buka di jam tertentu tutup di jam tertentu dan kembali lagi mengenai penyalurannya.

Lalu kemudian disamping itu mekanisme distribusinya juga untuk mendapatkan solar banyak sekali hal dan spesifikasi yang harus dilakukan oleh masyarakat, misalnya membawa dokumen seperti kartu pengenal, KTP lah ya, surat-surat lainnya dan hal-hal seperti ini sebetulnya memang merupakan salah satu niat besar untuk memperbaiki data, tapi di samping itu kayanya yang masih kurang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat dan bagaimana mereka juga terjamin untuk kemudian bisa mensertakan dokumen-dokumen tersebut, karena kadang-kadang kalau di masyarakat itu *kan*, kalau kita mungkin kita anggap sepele ya kita semua juga punya KTP kita kalau ke SPBU gampang tinggal kasih lihat, tapi kalau masyarakat di wilayah terpencil itu kadang-kadang bahkan nilai, mohon maaf kartu pengenal ini mereka *nggak* punya atau hilang atau apa.

*Nah* itu hal-hal seperti itu gimana kita bisa mencari solusi titik temu di tengah agar kemudian mereka tidak merasa bahwa ada *treatment* yang tidak *fair gitu*, yang kemudian mereka rasakan di lapangan. Saya mohon nanti kerjasamanya, *insya* Allah diluar dari rapat ini kita juga bisa telusuri agar pulau kecil ini bisa mendapatkan atensi khusus, tapi di samping itu saya yakin negara Indonesia sangat besar dan wilayah-wilayah terpencil ini saya rasa mungkin 11-12 lah ya masalahnya yang dialami di lapangan. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua, terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

*Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Ibu Roro, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari pandangan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dirjen Migas dan Dirut Pertamina untuk memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan dari Anggota Komisi VII DPR RI. Secara singkat dan kalau memang tidak bisa dijawab semua bisa tertulis nantinya Pak, silakan Pak.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Baik, terima kasih. Yang pertama kami rangkumkan termasuk pertanyaan Pak Hendrik, Ibu Paramitha, Ibu Roro, dan yang lain-lain saya gabung. Begini, kalau untuk mendapatkan *import* ya Pak Hendrik, itu kita sekarang ini sudah ada sistem, jadi kita ngikutin neraca komoditas, jadi harus masuk dulu kemudian gerbongnya jalan akhirnya ketinggalan *nggak* bisa, jadi sekarang itu *import* seperti itu, izin itu *nggak* acap kali kita memberikan izin itu tidak, tapi sudah dalam neraca komoditas, jadi kalau semacam tadi ada yang ingin mengajukan izin *import* itu *nggak* bisa serta merta mengizinkan begitu.

*Nah* kemudian kalau INU darimana dapatnya BBM mungkin kalau menurut hemat kami kita duduk bersama dan kita telusuri darimana Pak, kita ada datanya, ini mohon habis ini kita, ya dapatnya darimana kita bisa ada datanya, terima kasih.

Ibu Paramitha tidak ada yah, tapi kurang lebih saya jawab begini, registrasi itu adalah kebijakan yang mendaftarkan saja *gitu*, mendaftarkan siapa yang membeli, jadi tidak ada efek dampak terhadap bahwa yang didata itu akan dikurangi misalnya tidak boleh membeli atau bagaimana, tidak, registrasi itu saat ini yang dilakukan registrasi saja, bahwa itu didaftarkan.

Dan progresnya Ibu Roro, progresnya itu kalau menurut kami sangat bagus, kita malah bisa mempercepat, memang ada berita di TV KTP dan sebagainya tapi itu kalau secara *overall* bisa saya sampaikan ya, saat ini sudah jumlah yang bertransaksi sudah punya datanya, jadi sekitar 761 20 yang punya NIK, jumlah pembeliannya konsumen dari yang sampai 8 Juni itu sekitar 3 juta tabung, jadi sudah ada progres di sana dan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kita terus, terus melakukan ini dan harapannya tahun ini bisa selesai.

Jadi bisa disampaikan bahwa dari pendataan tadi, 100, sebentar saya cek dulu, jadi saat ini itu agar ke depan dilakukan lagi untuk investasi Pulau Jawa, Bali, dan NTB, itu 138 kota kabupaten dan Juni ini diusahakan selesai, sedangkan untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu 273 Kota Pak, jadi kalau menurut kami progresnya cukup bagus yah, masyarakat mata uang



memang agak sulit, begitu juga dengan pendataan BBM itu, yang namanya pendataan dengan *barcode* itu hampir 90% cepat sekali kecepatannya, dan kita mempunyai tim khusus untuk itu.

*Nah* kemudian terkait naik data kenapa kita memakai P3KE karena di P3KE itu mempunyai Satgas *Updating*, *nah* dan P3KE ini semua bersejarah Pak Ketua, P3KE itu dulunya namanya data dari BKKBN jaman Pak Harto dulu, jadi panjang histori pendataannya, namun demikian kami awalnya tetap memakai DTKS, kemudian kita lihat DTKS ternyata ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kemudian kami gunakan dua-duanya saja dengan P3KE.

*Nah* sekarang kalau kami melihat DTKS juga membaik, membaik dengan *updating* itu, jadi kami menggunakan dua-duanya, kita tidak mempunyai basis data lagi antara 2 itu, jadi kalau desa mengatakan Ibu Paramitha itu alasannya adalah kita punya 2 data itu dan kita pakai dua-duanya *gitu*, jadi nanti akan, yang penting *updating* sebetulnya, kalau sudah ada yang masuk nanti, karena begini data masyarakat miskin ini bisa bergerak itu yang tidak mudah, jadi sekarang sekian nanti bisa bergerak lagi karena mereka naik ekonominya atau pindah tempat dan sebagainya dan itu yang perlu harus data *updating* itu kunci dari data *updating*, silakan Bu.

#### **F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):**

Izin Pak Ketua, mau nanya saja langsung, jadi tadi *kan* berarti data ini kita, mungkin interaktif saja Pak Dirjen, datanya berarti dari keduanya digunakan ya, dari Kemensos digunakan, dari kementerian yang barusan juga digunakan, *nah* itu apakah selama ini ada tumpang tindih data ya antara kedua sumber itu?

#### **DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Ya kita pilih yang lengkap, karena begini DTKS itu kita pakai pada saat uji coba, *nah* ada suatu kekurangan-kekurangan kemudian kita lanjutkan ke bagaimana dengan P3KE, nanti kita P3KE kerjasama dengan KNP2K dan Satgas P3KE untuk menggunakan itu, jadi kita punya MoU dan datanya sudah ada di kami dan kami harapkan untuk bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi kalau menurut kami perkembangannya mungkin, kami punya analisis per desil ya, desilnya ini sudah mempunyai data yang mana yang masyarakat miskin benar *gitu* dan di luar itu, jadi itu sangat penting untuk kami itu.

*Nah* kemudian tentang yang Bawean tadi kami akan dengan senang hati Bu, kita akan turunkan tim bersama dengan DPR. Ada juga Bapak Bambang Hermanto ya nanti kita juga coba, memang di Indramayu pernah terjadi penimbunan-penimbunan, jadi kita mau lihat lagi. Saya kira itu kurang lebih Pak Ketua apa yang bisa saya sampaikan, mungkin Pertamina bisa menambahkan silakan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Bu.

**DIREKTUR KEUANGAN PT. PERTAMINA (EMMA SRI MURTINI):**

Izin barangkali menambahkan sebelum nanti detail operasional Pak Alvian bisa menambahkan lebih detail. Tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Dirjen, jadi untuk terkait registrasi untuk pengguna LPG ini tahapannya untuk hanya meng-*capture* data saja, tidak mempengaruhi terhadap eligibilitas pengguna untuk membeli LPG, jadi betul hanya pendataan saja, dan ini adalah salah satu upaya kami mendukung kebijakan Pemerintah dan juga yang diusung oleh Komisi VII untuk kebijakan tepat sasaran, tadi yang disampaikan datanya ini baru *capturing*, registrasi dan kita uji cobakan di beberapa daerah yang saat ini sudah mencapai kurang lebih 140 kabupaten kota, Ibu.

*Nah* barangkali ke depannya tentunya ada kabupaten kota yang terkendala dengan sinyal, segala macam itu yang kami segera siapkan *back up plan*-nya, jadi intinya kita *capturing* data dulu sehingga kita bisa *memprofile*, *costumer*-nya itu apakah *profilingnya* dari sisi UMKM, pengguna rumah tangga, nelayan, *nah* itu sehingga kita punya data dari sisi kebijakan nantinya pemerintah ke depan bisa menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran lagi seperti itu.

Tadi barangkali dari Bapak/Ibu ada meng-*address* terkait dengan kelangkaan, oplos, mungkin ini hal-hal yang sifatnya operasional tentunya dari kami juga bekerjasama dengan para penegak hukum, aparat setempat barangkali untuk mencegah hal-hal terkait, mungkin untuk detailnya barangkali dari Pak Alvian silakan menjelaskan.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Sebelum **...(suara tidak jelas 01.01.06)**, saya perpanjang waktu dulu, kita perpanjang sampai 12.45 yah.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI )**

Silakan.

**DIREKTUR UTAMA PERTAMINA PATRA NIAGA (ALFIAN NASUTION):**

Terima kasih Pak Pimpinan, terhadap kasus pengoplosan untuk beberapa lokasi yang kita lihat LPG-nya mungkin sedikit banjir, kita temukan memang kita kerjasama sengan aparat itu ada pengoplosan yang kami tindak,



jadi begitu ada agen yang terlibat dalam kasus pengoplosan itu langsung kami terminasi Pak Pimpinan, dan itu datanya kita ada.

Kemudian terhadap kebijakan penyaluran pada tanggal merah atau falkutatif yang ditanyakan Bu Mitha tadi, pada dasarnya itu melihat kondisi *demand* masyarakat apabila di lokasi tersebut hasil evaluasi dari petugas atau sales kita disana itu memang kebutuhan masyarakatnya *real* itu tetap kita salurkan meskipun tanggal merah.

Kemudian terhadap tadi pertanyaan Pak Willy beberapa lokasi yang *heat*-nya tinggi, pada dasarnya HET ini *kan* ditentukan oleh Pemda, tadi kita diskusi sama Pak Dirjen bahwasanya *next* akan dibuatkan formula agar dalam perhitungan HET itu nanti akan standar, jadi beberapa item-item yang dalam formula tersebut tinggal dimasukan kondisional dari masing-masing daerah, jadi mungkin akan kita buat semacam formula yang nanti ditentukan oleh Pak Dirjen untuk diusulkan di masing-masing daerah agar tiap-tiap daerah tidak bisa menetapkan yang deviasinya terlalu tinggi antara daerah satu dengan daerah lain terhadap HET.

Kemudian juga tadi untuk SPBE mungkin ya, SPBE subsidi dan SPBE non subsidi, jadi mungkin bukan depo ya, penyaluran untuk ke agen itu kita sebut SPBE. SPBE subsidi dan non subsidi ini sebenarnya terpisah begitu, jadi kita bisa mendeteksi bahwa SPBE ini adalah SPBE subsidi karena dia akan menyalurkan khusus untuk LPG 3 kilogram saja ke agen, yang non subsidi dia akan menyalurkan misalnya yang Bright, ngisi Bright dan juga ngisi yang tabung-tabung 12 kilogram, jadi itu gampang dibedakan dan apabila, rasanya tidak mungkin karena *karoseri* pengisiannya juga setingannya berbeda antara yang subsidi dan non subsidi.

Kemudian sedikit terkait dengan Bawean Bu, Bawean ini memang sudah menjadi perhatian kami beberapa tahun yang lalu juga, kemarin kita akan melakukan tambahan tangka-tangki Bu, di lokasi penyaluran sana, tujuannya untuk *back up stock* yang lebih banyak, lebih tinggi ketika terjadi kendala ombak dan sebagainya itu mudah-mudahan bisa meng-*cover*, kami juga untuk mengatasi kondisi *supply* di Bawean ini kami kerjasama juga dengan TNI AL, artinya ketika kondisi sangat ekstrim ombak itu dibantu sama TNI AL dengan kapal-kapal untuk *supply* begitu.

Itu yang sedikit yang untuk data DTKS dan P3KE, kebetulan kita waktu itu uji coba LPG 3 kilogram nya Bu ya, memang DTKS-nya sedikit deviasinya besar datanya, makanya kemudian seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi kita akhirnya menggunakan data P3KE milik PMK itu deviasinya lebih kecil, tapi tetap belum sempurna makanya kami tambahkan dengan pendaftaran-pendaftaran di tempat untuk kita saling *upgrade* data orang-orang yang berhak untuk mendapatkan LPG.

Mungkin itu sedikit tambahan, terima kasih Pak Pimpinan.



**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI  
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, cukup saya pikir, Bapak/Ibu demikianlah jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Direktur Pertamina, apabila tidak ada hal lain yang perlu disampaikan maka kami bacakan draf kesimpulan.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut Pertamina (Persero):

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembatasan atau *Loading Order* (LO) untuk setiap agen perusahaan maksimal 6 LO per hari guna mendukung pemerataan distribusi LPG 3 kilo di seluruh pelosok Indonesia  
Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI )**

2. Berdasarkan pendalaman yang telah dilakukan Komisi VII DPR RI termasuk pertimbangan peningkatan permintaan masyarakat dan prognosa realisasi kuota *volume* LPG 3 kilo di tahun 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton, maka Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut Pertamina (Persero) bahwa kuota *volume* LPG 3 kilo pada RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 8,3 juta metrik ton.

Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI )**

3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia dan Dirut Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 21 Juni 2023.

Disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI )**



Bapak/Ibu yang saya hormati, demikian pembahasan rapat dengar pendapat pada hari ini, sebelum mengakhiri rapat kami persilakan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup, kami persilakan.

**DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (TUTUKA ARIADJI):**

Terima kasih Ketua, kami mengucapkan terima kasih atas masukan, diskusi bersama dengan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII yang konstruktif dan kami bersama dengan Pertamina akan melaksanakan hasil dari kesimpulan ini secara konsisten dan melakukan konsultasi di setiap waktu dibutuhkan oleh Komisi VII, terima kasih.

**KETUA RAPAT (H. DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih kami sampaikan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM dan Dirut Pertamina (Persero) dan atas kerjasama yang baik pada rapat hari ini, kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII serta mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* rapat dengar pendapat hari ini saya tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.40 WIB)  
(KETOK PALU 3 KALI)**

*Billahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.  
NIP. 196903131990032002

